



► BANTUAN HUKUM

## Pemkot Siap Bantu Warga Miskin

UMBULHARJO—Pemkot Jogja berkomitmen memberikan bantuan hukum bagi warga miskin. Salah satu bentuk komitmen itu yakni dengan menggandeng dan bekerja sama organisasi bantuan hukum (OBH). Perjanjian kerja sama ditandatangani Sekda Kota Jogja, Aman Yuriadjaya di Balai Kota Jogja, Jumat (19/1).

Aman mengatakan, saat ini merupakan tahun ketiga bagi Pemkot Jogja dalam memberikan layanan hukum bagi warga miskin. "Ini bentuk afirmasi kami kepada masyarakat miskin, sehingga kami buktikan tetap istikamah, tahun ketiga perjalanan dari bantuan hukum ini tetap tidak berubah," ujarnya, Jumat.

Melalui program ini, warga Kota Jogja bisa mengakses bantuan hukum mulai dari pendampingan litigasi atau bantuan hukum di pengadilan hingga non-litigasi seperti sosialisasi tentang hukum. Dia berharap, program bantuan hukum bagi warga miskin bisa mewujudkan masyarakat yang melek hukum. "Selain itu juga bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat lewat pendampingan litigasi," kata Aman.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jogja, Rihari Wulandari menjelaskan semula ada 22 OBH yang bergabung dalam program ini. Namun, salah satu OBH mengundurkan diri lantaran



**Sekda Kota** Jogja, Aman Yuriadjaya (kiri) se usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan OBH sebagai wujud bantuan hukum bagi warga miskin, Jumat (19/1).

terutama yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Sebelumnya, dana diberikan pada masing-masing OBH dengan besaran Rp12 juta. Namun, ini dinilai menjadikan serapan anggaran tak maksimal. Serapan anggaran pada 2022 baru mencapai 51%. Sementara di 2023 naik, tapi tak signifikan yakni 53%. "Sekarang kami buka, OBH bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota Jogja. Ini juga dibuktikan dengan persetujuan dari pejabat setempat, SK bahwa betul-betul warga miskin yang perlu dibantu permasalahan hukumnya," katanya. (Aiff Anissa Karlin)

Dia juga mengatakan, sepanjang 2023 ada 55 perkara baik litigasi maupun non-litigasi yang diselesaikan melalui program ini. "Untuk non-litigasi hanya difokuskan ke sosialisasi penyuluhan karena beberapa masyarakat belum paham apa yang harus dilakukan kalau mereka mendapatkan permasalahan hukum karena merasa takut kalau berhadapan dengan pengadilan," katanya.

Rihari menyebut ada strategi berbeda yang diterapkan di 2024,

terutama yang berkaitan dengan penyerapan anggaran.

Sebelumnya, dana diberikan pada masing-masing OBH dengan besaran Rp12 juta. Namun, ini dinilai menjadikan serapan anggaran tak maksimal. Serapan anggaran pada 2022 baru mencapai 51%. Sementara di 2023 naik, tapi tak signifikan yakni 53%. "Sekarang kami buka, OBH bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota Jogja. Ini juga dibuktikan dengan persetujuan dari pejabat setempat, SK bahwa betul-betul warga miskin yang perlu dibantu permasalahan hukumnya," katanya. (Aiff Anissa Karlin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005